



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
WAKTU RESPONS DAN WAKTU TEMPUH
PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat terhadap kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara cepat, efektif, dan efisien, perlu adanya pengaturan terhadap waktu respons dan waktu tempuh penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG WAKTU RESPONS DAN WAKTU TEMPUH PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

- (1) Dalam menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan:
 - a. waktu respons; dan
 - b. waktu tempuh.
- (2) Waktu respons dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi.
- (3) Untuk dapat mencapai waktu respons dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan personel, peralatan deteksi dini, telekomunikasi, dan sistem informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 2

Waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a merupakan jangka waktu yang dihitung sejak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima informasi/laporan terkait dengan keadaan yang berpotensi

menimbulkan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia sampai dengan unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan.

Pasal 3

- (1) Waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencatatan informasi/laporan;
 - b. verifikasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan personel, sarana dan prasarana; dan
 - d. *briefing* keberangkatan.
- (2) Pencatatan informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. sumber informasi kejadian;
 - b. jenis kejadian;
 - c. lokasi kejadian; dan
 - d. jumlah korban.
- (3) Verifikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengecekan kebenaran informasi/laporan kejadian kepada instansi terkait; dan
 - b. melaporkan informasi awal kepada pimpinan.
- (4) Penyiapan personel, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemberitahuan kepada personel yang akan dikerahkan;
 - b. pengecekan kesehatan personel;
 - c. pengecekan sarana dan peralatan personel;
 - d. pengecekan kompetensi personel; dan
 - e. penentuan jumlah personel, sarana dan peralatan yang akan dikerahkan sesuai dengan jenis kejadian kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- (5) *Briefing* keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyampaian informasi kepada seluruh personel yang akan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, meliputi:

- a. data korban;
- b. tanggal dan waktu kejadian;
- c. lokasi kejadian;
- d. objek yang dicari;
- e. kondisi cuaca di lokasi kejadian;
- f. pola pencarian;
- g. frekuensi radio komunikasi;
- h. nomor telepon dan/atau kontak pelapor;
- i. rencana darurat;
- j. rencana evakuasi;
- k. perkiraan waktu tempuh ke lokasi kejadian; dan
- l. struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

- (1) Waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama 25 (dua puluh lima) menit.
- (2) Dalam hal untuk mempercepat waktu respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kegiatan pada waktu respons dapat dilakukan secara simultan.

Pasal 5

Kegiatan waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

- (1) Waktu tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b merupakan jangka waktu yang dihitung sejak unit pencarian dan pertolongan dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi kejadian.
- (2) Unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. sumber daya yang dimiliki instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan.

Pasal 7

- (1) Waktu tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan paling lama 150 (seratus lima puluh) menit.
- (2) Penetapan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan hambatan seperti cuaca, kondisi jalan seperti berlubang, mendaki, berbelok-belok, macet, akses jalan terputus, dan gangguan keamanan.

Pasal 8

Waktu respons dan waktu tempuh dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dievaluasi secara berkala oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal memenuhi waktu respons dan waktu tempuh dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, dapat melibatkan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan.
- (2) Instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengerahan unit pencarian dan pertolongan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (3) Unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personel, sarana, dan peralatan yang dapat mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (4) Pengerahan unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Potensi pencarian dan pertolongan wajib memenuhi dan membantu dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atas permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
WAKTU RESPONS DAN WAKTU
TEMPUH PENYELENGGARAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TABEL TAHAPAN WAKTU RESPONS
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

WAKTU RESPONS			
0 – 5 Menit	5 – 10 Menit	10 – 20 Menit	20 – 25 Menit
- Mencatat data pelapor seperti: • Nama; • Jenis kelamin; • Alamat; • Usia; • Pekerjaan; • Nomor telepon; • Hubungan dengan korban; - Mencatat informasi kejadian seperti: • jenis kejadian • lokasi kejadian • data korban • Jumlah Korban	- Melapor kepada pimpinan: • Kagahar • Kasi/Kasubsi Operasi dan Siaga • Kepala Kantor • Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan - Melakukan pencarian dengan komunikasi awal; - Mengecek kebenaran informasi kepada instansi terkait, antara lain: (TNI, Polri, Unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayaran dan penerbangan, BPBD, BMKG, dan Agen atau Pemilik Kapal/Pesawat Udara); - Menyebarluaskan informasi kejadian melalui <i>e-broadcast</i>	- Menyiapkan Berita SAR Penunjukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan - menyerahkan konsep Berita SAR kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan - mengirimkan Berita SAR ke BCC dalam bentuk <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> - permintaan bantuan untuk menyiapkan personel, sarana dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	- Pengecekan kesiapan personel, sarana dan peralatan, logistik - Penyampaian misi - Pemberangkatan unit pencarian dan pertolongan

WAKTU RESPONS			
0 – 5 Menit	5 – 10 Menit	10 – 20 Menit	20 – 25 Menit
		- <i>plotting</i> lokasi kejadian awal di peta - penentuan personel, sarana dan peralatan yang akan digunakan - menyiapkan personel, sarana dan peralatan yang akan digunakan	

Keterangan:

- 1. Waktu respons dalam tabel merupakan panduan waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.
- 2. Kegiatan dalam tabel dapat dilakukan secara simultan dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.